



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Yusuf Ramadhan Panjaitan Bin M. nasir Panjaitan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Jl Binjai Lk VII Kelurahan Semula jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Semula Jadi, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

**Putri Ardia Binti Ardi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Binjai Lk VII Kelurahan Semula jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Semula Jadi, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba pada tanggal 06 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2023, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Terisi Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Budi Ardi** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Syahrizal Sirait** dan **Hafizun Silaen** dengan mahar berupa sebetuk cincin emas;
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Gadis;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Tuan Kadhi yang bernama **Aidil**, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, karena usia Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan belum dikarunia anak.
8. Bahwa permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Administrasi-Administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon adalah Warga kurang mampu dan tidak sanggup membayar biaya perkara dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, kiranya berkenan

Halaman 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**M. Yusuf Ramadan Panjaitan bin M. Nasir Panjaitan**) dengan Pemohon II (**Putri Ardia binti Budi Ardi**) yang di laksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Terisi Lingkungan II Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Administrasi-Administrasi lainnya
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Tanjungbalai telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Halaman 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I NIK 1274061511020001 Tanggal 12 Agustus 2021 dan Pemohon II NIK 1274044610050001 Tanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274062105240004 atas nama kepala keluarga M. Yusuf Ramadan Panjaitan (Pemohon I) tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti saksi.

1. Putra Efendi Nasution bin Syatir Efendi Nasution, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Paman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;

Halaman 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budi Ardi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahrizal Sirait dan Hafizun Silaen;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa sebarang cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon I dan keperluan Administrasi lainnya;

2. Darwin bin Syamsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Budi Ardi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahrizal Sirait dan Hafizun Silaen;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa sebarang cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon I dan keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk

Halaman 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi. Maka Hakim Tunggal akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Putra Efendi Nasution bin Syatir Efendi Nasution) merupakan Paman Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Darwin bin Syamsudin) merupakan Tetangga Pemohon, menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan saksi mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan karena saksi hadir sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan

Halaman 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Budi Ardi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah sebertuk cincin emas;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية  
المسترشدين : 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi :

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim

Halaman 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan (M. Yusuf Ramadhan Panjaitan Bin M. nasir Panjaitan) dengan (Putri Ardia Binti Ardi) secara Agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara ini secara prodeo murni sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 274/KPA.W2-A3/SK.HM.00.5/XI/2024, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Yusuf Ramadhan Panjaitan Bin M. nasir Panjaitan), dengan Pemohon II (Putri Ardia Binti Ardi), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

Halaman 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang Terpadu Pengadilan Agama Tanjungbalai di Aula Pendopo Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Sarifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Indra Nawawi, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Indra Nawawi, S.Ag., M.A.**

**Sarifuddin, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	00,00
2.-----	Biaya proses	Rp	00,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	00,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	00,00
5.-----	Hak redaksi	Rp	00,00
6.-----	Meterai	Rp	00,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	00,00

(NIHIL)

Halaman 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Tba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)